

“LAPAK” POLITIK KELAS DALAM SEJARAH INDONESIA?

(Sekelumit Persoalan Pengorganisasian Rakyat Pekerja Indonesia)

Willy Aditya¹

Abstract

A struggle against oppression in any way of it always requires an “organizing” action. Organizing, especially organizing people, has become the key of success for the struggle combating it. Organizing the working people is the strategy and even a tactics in terminating the chain of the people's being oppressed. Releasing the working people out of their being oppressed is the primary matter normally faced by human civilization. The Indonesian working people themselves have faced the critical situation, as they are indeed at a position of such incomplete transformation just before the end of the colonization by the imperialists.

Pengantar

Gelombang pasang demokrasi nasional di Amerika Latin menjadi rujukan kontemporer bagi gerakan rakyat pekerja di negara-negara dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia. Kemenangan kelompok kiri tak hanya pada tingkatan influence ter-

hadap kebijakan Negara, namun sampai pada kursi presiden. Banyak tafsir dari gelombang pasang demokrasi nasional di negara Amerika Latin, mulai dari munculnya new social movement, kejenuhan demokrasi ala neo-liberalisme yang memiskinkan, sampai pada kerinduan terhadap wajah baru sosialisme. Apa pun argu-

¹ Willy Aditya, Sekretaris Jenderal Komite Persiapan Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP). Menamatkan Studi di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta program studi Ideologi dan Politik.

mentasi dan asal latar ideologi, sejarah pergolakan kekuasaan yang panjang telah memberikan pelajaran tersendiri tentang mengakarnya pengorganisasian rakyat pekerja.

Tidak dapat disangkal bahwa perjuangan melawan penindasan baik kolonialisme maupun neo-kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apa pun, selalu saja membutuhkan "pengorganisasian". Pengorganisasian, terutama pengorganisasian rakyat, menjadi kunci dari suksesnya perjuangan melawan penindasan. Kuba adalah contoh yang baik dalam sejarah abad ke-20 yang mencatat kebenaran tesis ini dalam konteks perlawanan terhadap kapitalisme dan neo-kolonialisme (Machel, 1999).

Rakyat pekerja, istilah apakah ini? Kenapa tidak proletariat yang lebih tegas dalam polarisasi kelas, marhaenisme yang merupakan pemikiran orisinal Soekarno terhadap relasi produksi negara terjajah, Murba dalam istilah Tan Malaka, atau rakyat

misikin yang akhir-akhir ini sering dipakai? Rakyat pekerja dalam terminologi Marxian memiliki kecenderungan pembauran dari komposisi kelas buruh, pekerja mandiri, dan borjuasi kecil progresif. Penulis menggunakan terminologi 'rakyat pekerja' berangkat dari kecenderungan komposisi kelas di Indonesia yang memperlihatkan banyaknya borjuasi kecil dan pekerja mandiri.² Secara ideologis, posisi politik kepemimpinan kelas buruh dalam relasi produksi termaju tak disangsikan lagi. Namun, materialisme dialektika adalah ilmu pengetahuan tentang ruang praktik perjuangan yang luwes dalam eksplorasi karakter massa berlawanan. Politik pembebasan rakyat pekerja bukanlah ruang kosong yang bereksperimentasi dalam wacana besar di media massa liberal atau propaganda koran partai saja. Untuk konteks Indonesia, setidaknya harus mampu diselesaikan delinking sejarah perjuangan kelas serta mencoba mengisi kekosongan politik kelas.³

² Pekerja mandiri bukanlah buruh dalam relasi produksi kapitalisme yang menjual penuh tenaganya untuk mendapatkan upah. Pekerja mandiri memiliki otoritas (*self authority production*) berproduksi dalam skala tertentu dan tak terikat disiplin besi seperti pabrik. Pekerja mandiri acapkali ditemukan di negara-negara postkolonial seperti tukang bakso, tukang sol sepatu, tukang becak, dsb.

³ Istilah 'politik kelas' dirujuk karena menempatkan masyarakat dalam konteks kepentingan sosial-ekonomis yang dibawanya. Dalam konteks ini, kepemilikan atau dominasi ekonomi atau penguasaan atas alat-alat produksi dianggap sebagai faktor utama yang memilah-milah masyarakat. Dominasi ini tidak terjadi secara alami atau takdir, tetapi sebagai sesuatu yang sistematis karena penguasaan sumber-sumber ekonomi (basis material) ini juga berkorelasi langsung dengan upaya perebutan dan mempertahankan 'kekuasaan politik'.

Pembebasan Rakyat Pekerja dari rantai ketertindasan adalah persoalan pokok yang selalu dihadapi oleh peradaban manusia. Persoalan lanjutannya adalah bagaimana strategi dan taktik untuk memutus rantai ketertindasan tersebut. Apakah perjuangan revolusioner atau damai, metode ini selalu tidak berdiri bebas dalam zamannya namun berkorespondensi terhadap kesiapan massa dan sejarah massa berlawanan. Namun, kata kunci tetapnya tak bisa disangkal adalah pengorganisasian rakyat pekerja!

Apakah pengorganisasian rakyat pekerja dalam situasi sekarang memiliki perspektif politik kelas? Untuk mengurai pertanyaan tersebut, mungkin harus dilakukan analisis secara komprehensif dari aktor, strategi, dan taktik yang dipilih. Politik kelas harus diterjemahkan secara plural dalam berbagai dimensi kreatif. Politik kelas harus pula menyebar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi obyektifnya masing-masing.

Akhir-akhir ini kata "pengorganisasian" menjadi kata yang amat sering dipakai di setiap rapat komite aksi, pendidikan fasilitator, sampai forum otokritik. Namun demikian, pada kenyataannya justru kurang

sekali pelaksanaannya. Di mana sebenarnya letak silang-sengkarut pengorganisasian di tengah sejumlah klaim berbagai kelompok tentang senjata perlawanan rakyat untuk pembebasan ini?

Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketertindasan Rakyat Pekerja

Krisis berkepanjangan yang terjadi berulang-ulang dalam kapitalisme sesungguhnya korban utamanya selalu bukan kelas borjuis dan kaum penguasa. Fakta-fakta yang nyata dan terang-benderang terus-menerus dipelintir dan dikaburkan sehingga realitas yang sesungguhnya tidak dikenali lagi. Begitu kabur hingga hanya sedikit pakar yang mengemukakan realitas pahit yang terus terjadi, bahkan setelah berakhirnya rezim otoriter Suharto, seperti yang diingatkan oleh Ignas Kleden (2003) bahwa kelas bawah terus dipaksa membayar privilese dan kemewahan buat kelas atas. Untuk lebih jauh mengenali realitas ketertindasan kelas pekerja, kita perlu mendalami beberapa deskripsi berikut tentang kenyataan itu dalam pengalaman sektoral rakyat pekerja di Indonesia hingga hari ini.

Kaum Buruh:

Rakyat pekerja Indonesia dihadapkan pada situasi yang selalu krisis karena memang berada dalam suatu transformasi yang tidak akan terselesaikan sebelum berakhirnya penjajahan oleh imperialisme. Imperialisme mengakibatkan pengereman laju masyarakat suatu negeri, karena super profit diakumulasi di luar negeri sehingga mengakibatkan stagnasi pertumbuhan pembangunan industri baru. Hal ini adalah salah satu latar belakang munculnya hutang dari negeri-negeri donor atau lembaga-lembaga internasional, yang pada hakikatnya modal tersebut adalah hasil dari penghisapan terhadap negara-negara semikolonial dan kolonial.

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Suharto menetapkan berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 tentang Penanaman Modal Asing yang dilanjutkan dengan pembentukan Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing pada 19 Januari 1967. Sementara sebagai kelanjutan Pertemuan Tokyo pada bulan September 1966, pada tanggal 23-24 Februari 1967 di Amsterdam diselenggarakan pertemuan untuk membentuk sebuah badan pemberi pinjaman yang dikenal dengan sebutan Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI). Dalam Amsterdam Meeting ini disepakati bantuan sebesar US\$ 325 juta kepada Indonesia. Pinjaman dan investasi swasta asing pun masuk, maka dibukalah kawasan-kawasan industri. Hingga 1995 kawasan industri telah menggunakan lahan seluas 42.304,35 Ha, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Kawasan Industri di Indonesia

Lokasi	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
DKI Jakarta	6	3.151,6
Jawa Barat	75	21.489,4
Jawa Tengah	15	2.891,4
Jawa Timur	29	6.035,69
Sumatera	18	6.869,24
Sulawesi	3	1.015,02
Kalimantan	6	852
J U M L A H	152	42.304,35

Sumber: Himpunan Kawasan Industri (HKI), dikutip dari "Lahan Kawasan Industri di Indonesia 42.304 Ha, Kompas, 13 Juli 1995

Pembukaan kawasan-kawasan industri ini ditopang oleh kebijakan pemerintah yang kooperatif terhadap investasi, tetapi bersikap sebaliknya dalam memperlakukan kaum buruh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan utama bahwa investasi masuk ke Indonesia adalah karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif, yakni tenaga buruh yang murah dan iklim investasi yang nyaman di bawah rezim Orde Baru.

Peralihan rezim dari Soeharto ke Habibie mulai membawa perubahan kebijakan terhadap kaum buruh. Habibie mulai meratifikasi konvensi ILO mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebagai hak kolektif buruh untuk melakukan perjanjian. Juga mulai terjadi demokratisasi di tingkatan pabrik dengan bermunculannya organisasi-organisasi serikat buruh baru di luar korporatisme Orde Baru. Namun di sana-sini masih terdapat kekangan terhadap hak buruh untuk berorganisasi, apalagi untuk menyalurkan hak mereka untuk mogok atau berdemonstrasi. Jika sebelumnya pada masa Orde Baru terdapat kekangan dan korporatisme organisasi yaitu harus melalui SPSI sebagai serikat pekerja resmi, kemudian mulai terjadi demokratisasi dengan berdirinya banyak serikat buruh baru yang melakukan tuntutan-

tuntutan radikal dan bahkan politis.

Setelah berjalannya agenda neoliberalisme imperialisme untuk melakukan privatisasi dan pasar bebas, mulai muncul persoalan baru bagi kaum pekerja Indonesia yaitu relokasi industri dan pengurangan jumlah pekerja. Pada tahun 2002 lalu, misalnya, terjadi relokasi pabrik Sony Indonesia ke Vietnam. Kasus Sony ini menjadi gunung es dari persoalan imperialisme yang tidak mengenal batas-batas negara. Kemudian mulai terjadi demonstrasi dan mogok kerja pekerja-pekerja BUMN yang sebelumnya dikenal moderat (plat kuning). Bahkan sampai tesis ini dibuat, pekerja PT Dirgantara Indonesia (BUMN) masih melakukan mogok kerja karena ancaman pensiun awal dari pihak manajemen perusahaan sebagai konsekuensi dari masalah keuangan. Sebelumnya, bahkan ribuan pekerja dari PT Dirgantara Indonesia, Indosat, Semen Padang, dan banyak lagi BUMN lain di Indonesia pernah melakukan hal serupa yang menggugat privatisasi yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tempat mereka bekerja.

Di banyak perusahaan masih terjadi mogok atau unjuk rasa buruh mengenai masalah pengupahan,

tunjangan, dan beberapa hak dasar mereka yang belum diberikan oleh pengusaha. Persoalan ini semakin memberatkan buruh karena sekarang ada rencana dari pemerintah untuk mengundang-undang RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang mengancam hak buruh untuk bersatu dalam memperjuangkan nasib mereka.

Kaum Tani:

Kaum tani Indonesia dewasa ini mengalami bermacam penindasan, penghisapan, dan gangguan sebagai berikut:

- Di beberapa tempat masih terdapat penindasan tuan tanah dan lintah darat yang menghisap kaum tani berdasarkan hubungan patron-klien yang feodal karena pembelokan program *Land Reform* oleh rezim berkuasa;
- Pengambilalihan lahan kaum tani dengan paksa atau setengah paksa oleh kapitalis (baik lokal maupun imperialis) yang didukung oleh birokrat/militer dan kapitalis birokrat sendiri;
- Murahness nilai produk pertanian karena terbukanya impor pangan, tidak adanya subsidi untuk pupuk, dan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani lainnya;
- Monopoli bibit, produksi, dan pe-

masaran produk pertanian oleh kapitalis; monopoli adalah konsekuensi dari liberalisasi pertanian.

Tatanan ekonomi global imperialisme menempatkan negara-negara dunia ketiga yang berada di periferi sebagai pemasok bahan baku industri, penyedia tenaga kerja, dan sekaligus sebagai konsumen potensial produk-produk dari negara imperialis. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya perlambatan transformasi masyarakat menuju kapitalisme. Industri yang dibangun adalah industri orientasi ekspor yang berteknologi rendah tetapi padat karya sehingga dipilih yang manufaktur (tekstil) dan pengolahan produk-produk pertanian seperti industri rokok, pengolahan makanan, dan sebagainya. Dengan demikian keunggulan ekonomi Indonesia adalah pada sektor-sektor yang berkaitan dengan ekstraktif yang membuatnya terbelakang dalam hal teknologi (sebagai salah satu aspek dari *force of production*). Hal ini membuka kesempatan bagi kapitalis (imperialis) — apalagi sejak dibukanya liberalisasi — untuk menanamkan modalnya dan mengembangkan hubungan produksi baru dengan kekuatan produksi yang lebih modern.

Penetrasi modal pertama dimulai dengan konsolidasi lahan milik tani

supaya bisa lebih efisien dalam pemanfaatan teknologi dan manajemen produksi. Terdapat empat cara untuk melakukan konsolidasi lahan ini:

1. Melakukan pembelian atau pengurusan dengan harga murah dengan menggunakan alat represi dari TNI atau negara (kasus Tapos);
2. Dengan sistem Corporate Farming atau Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang mengkonsolidasikan lahan petani-petani kecil dengan sistem pembagian saham atau si kapitalis berperan sebagai manajemen;
3. Menguasai lahan besar yang dimiliki secara komunal oleh rakyat, yaitu tanah-tanah marga, ulayat, dan sebagainya dengan perjanjian bagi saham atau pembagian keuntungan yang sebagian besar dinikmati oleh elite-elite masyarakat atau marga;
4. Perjanjian pembagian saham atau keuntungan antara kapitalis dengan pemilik lahan besar feodal yang menggusur petani penggarap yang sejak lama menggunakan tanah tersebut; atau kaum feodalnya sendiri yang mentransformasikan diri menjadi kapitalis yang memajukan corak produksi lahan yang dimilikinya sehingga petani penggarap tergusur.

Selain itu, masih terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh pembelokan program *Land Reform* oleh Orde Baru. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagian besar lahan-lahan yang di-*Land Reform* oleh rakyat di era Orde Lama adalah lahan hak *Erfpacht* (Hak Guna Usaha) yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Belanda. Hak *erfpacht* ini muncul dari politik agraria Belanda untuk menguasai lahan-lahan petani yang tidak dapat membuktikan kepemilikan lahannya kepada pemerintah kolonial pada waktu itu. Lalu lahan-lahan yang diserobot dari rakyat tersebut dikuasai oleh pemerintah kolonial yang kemudian memberikan hak guna usaha pada perusahaan-perusahaan perkebunan.

Hak guna usaha lahan-lahan hasil nasionalisasi oleh rakyat tersebut diserahkan oleh Orde Baru kepada militer, kabir (kapitalis birokrat), dan kapitalis-kapitalis kroni mereka. Dalam beberapa kasus terjadi kontradiksi kepentingan antara kaum tani dengan buruh perkebunan. Sesungguhnya kontradiksi pokok terjadi antara petani dengan kabir yang menguasai lahan, namun hubungan produksinya bukan lagi semata-mata antara petani dengan kabir namun juga terdapat hubungan produksi

antara buruh perkebunan dengan kabir.

Selain itu, petani kecil Indonesia juga berhadapan dengan pasar bebas dan persaingan bebas yang membuat mereka tidak mampu bersaing karena sistem produksi mereka yang tidak semaju sistem kapitalisme. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan petani seperti pencabutan subsidi pupuk, pembukaan pintu impor pangan, dan berbagai kebijakan lainnya yang membuat munculnya resistensi yang kuat dari massa tani terhadap negara.

Kaum Nelayan:

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai yang tergolong terpanjang di dunia. Sayangnya, dari segi produktivitas hasil laut, Indonesia kalah dari Inggris dan Thailand yang jauh lebih pendek garis pantainya. Produktivitas ini bukan semata dilihat dari kenyataan bahwa nelayan Indonesia tidak bekerja keras. Sekali-kali tidak! Nelayan Indonesia adalah nelayan yang bekerja keras, namun terbelakang dalam teknologi penangkapan ikan dan alat produksinya juga terbatas.

Dikenal tiga jenis nelayan, yakni buruh nelayan, nelayan kecil, dan nelayan besar. Buruh nelayan meru-

upakan buruh-buruh yang bekerja untuk nelayan besar dan kapitalis pemilik kapal. Kehidupan mereka sangat terhisap, bahkan banyak yang tidak diupah dengan layak oleh borjuasi. Sedangkan nelayan besar adalah nelayan yang memiliki alat produksi dan teknologi yang memadai serta mempekerjakan buruh-buruh nelayan dalam kegiatannya. Namun, massa terbesar dari nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yaitu nelayan yang hanya memiliki perahu kecil dan minim teknologi sehingga dalam bekerja sering melakukan upaya kolektif bersama nelayan-nelayan kecil lainnya. Nelayan kecil dan buruh tani merupakan sekutu terdekat kelas pekerja mengingat banyak perannya yang lain seperti penjagaan teritori dan pengangkutan sungai dan laut.

Kaum Miskin Kota:

Dalam proses transformasi masyarakat pra-kapitalisme menuju kapitalisme, terjadi peralihan kelas petani tak bertanah menjadi proletar. Dalam perkembangannya proses urbanisasi tak mampu menampung ledakan tenaga produksi ini sehingga memunculkan kelas di tengah (borjuis kecil dan semi proletariat) yang menggembung. Tak terkira contoh kasus yang menunjukkan bahwa penetrasi imperialisme di dunia ketiga telah menciptakan urban-proletariat (Co-

hen dan Gutkind, 1979). Fenomena yang terjadi di negara semikolonial atau negara yang sedang berevolusi menuju kapitalisme ini mengakibatkan munculnya kaum miskin kota dengan berbagai profesi. Profesi-profesi kaum miskin kota ini meliputi tukang becak, gelandangan, tukang ojek, pengamen, pemulung, pedagang kaki lima (kulakan), dan beberapa profesi lain. Heterogenitas pekerjaan dan bahkan tanpa pekerjaan (pengangguran) harus ditempatkan dalam pemahaman bahwa mereka adalah kelas pekerja dan subproletariat sesuai definisi "mereka yang tidak memiliki alat produksi dan tak memiliki suatu apa pun yang dijual kecuali tenaga untuk bekerja" (Sandbrook, 1975).

Jika mempunyai keterampilan kerja yang lumayan, kaum miskin kota ini bisa menjadi buruh di sektor-sektor industri rumah tangga seperti konveksi, fotokopi, karyawan toko, dan berbagai profesi buruh sektor informal lainnya. Namun, terdapat juga kaum miskin kota yang dibujuk rayu oleh kapitalis/borjuis untuk menjadi centeng mereka atau kemudian terjebak melacurkan diri, menjadi maling, atau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan kriminal lainnya oleh hukum yang berlaku.

Kaum miskin kota ini merupakan sekutu terdekat kelas pekerja dalam perlawanan melawan imperialisme dan negara diktator borjuasi. Kemunculan mereka merupakan dampak dari imperialisme yang menghalangi kemajuan perekonomian dan dampak dari kebijakan negara yang menjadi kaki tangan kapitalis. Sebagaimana kita ketahui, negara yang dikuasai oleh kapitalis akan menyusun perekonomian yang memihak kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat lainnya yang mayoritas.

★★★

Selain kelas-kelas yang telah disebutkan di atas, terdapat juga kaum terpelajar, pekerja seni, dan mahasiswa/pemuda yang juga merasakan kesukaran yang sama dengan yang dialami oleh kelas pekerja. Mereka tidak diuntungkan oleh hambatan-hambatan yang ada dalam suatu negara semikolonial, seperti tidak adanya penghargaan yang layak bagi pekerja seni yang pro-rakyat, kaum terpelajar yang jujur pada ilmunya, dan juga mahasiswa yang sering kali mengalami kesukaran dalam menuntut ilmunya karena kurangnya fasilitas dan tidak demokratisnya sistem pendidikan.

**Di Pinggiran Politik Rakyat
Pekerja Terkurung**

*Alang2 ditembok, berat kepalanja,
lemah pokoknja, dangkal akarnja.*

*Rebung digunung, runtjing putjuknja,
tebal kulitnja, kosong isinja.*

—Mao Tse Tung

Terpinggirnya kekuatan politik kelas dari dinamika politik nasional sekarang dapat diartikan terjadinya kekosongan secara vertikal dan horisontal antara gerakan politik yang berkembang dengan rakyat pekerja Indonesia. Secara vertikal bermakna bahwa belum ada kepemimpinan politik yang cukup memadai dan, terutama, dipercaya oleh massa. Memang hadir berbagai kekuatan atau organisasi yang berusaha tampil untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi pasca GESTOK 1965 sudah tidak ada lagi organ yang mampu memimpin dan menjadi muara perjuangan kelas di Indonesia. Organisasi atau kekuatan yang ada saat ini cenderung lebih banyak bertarung di ranah politik elite yang jauh dari kesadaran massa kelas Indonesia. Secara horisontal bermakna bahwa tidak ada kekuatan atau organisasi

yang memiliki anggota dan massa yang cukup besar untuk dapat bertarung secara riil dalam persoalan keseharian massa di tingkatan bawah.

Marx, Lenin, dan Mao sendiri memang sangat menitikberatkan taktik-strategi perjuangannya pada pengorganisasian dan politisasi kelas buruh dan tani untuk merebut negara. Hal ini wajar sebab Marx mengambil basis materi teorinya dari perkembangan masyarakat kapitalis Eropa serta penindasan kaum feodal terhadap kaum tani di China pada saat itu. Bagaimana dengan taktik-strategi perjuangan revolusioner di negeri-negeri terbelakang yang mayoritas masyarakatnya adalah petani atau dalam hubungan penindasan kolonialisme dan semi-feodal? (Wilson, 2003).

Praktik pengorganisasian rakyat pekerja di Indonesia 20 tahun terakhir bergerak tidak pada tujuan bagaimana merebut kekuasaan. Pemahaman tentang *civil society* dikonfrontasikan dengan *political society* sehingga membuat kesadaran yang seolah-olah anti *state*.⁴ Perjuangan

4 Baca Coen Husein Pontoh, Masyarakat Sipil sebagai agen Globalisasi. "Akankah *mission sacre* (misi suci) masyarakat sipil berupa gagasan emoh negara, dan memberi tekanan terus-menerus terhadap perilaku negara yang intervensionis, harus dipegang erat-erat? Lalu, buat apa kita membangun masyarakat sipil yang kuat di atas landasan mayoritas yang miskin? Bukankah kita sedang menggali liang kubur sendiri?"

politik menjadi ditabukan dan perjuangan ekonomi lebih dipilih. Kekecewaan terhadap gerakan politik — yang hasilnya selalu diambil oleh borjuasi oportunist atau elite politik — membuat gerakan sosial kemudian malas merambah ke dunia yang seharusnya menjadi medan pertarungan yang sesungguhnya. Kecenderungan *civil society* yang memisahkan antara perjuangan ekonomi dan perjuangan politik kelas adalah wujud alamiah dari masyarakat dengan relasi sosial yang ditentukan kapitalisme, berbeda dengan tahap perkembangan sejarah dalam corak produksi sebelumnya yang tidak memisahkannya.

Ironisnya, di berbagai kalangan yang lantang menyuarakan kritik atas kapitalisme — LSM, kelompok buruh, kelompok tani, atau kelompok pengorganisasian sosial lain — pemisahan perjuangan ini juga dipelihara, dengan menyatakan bahwa urusan mereka adalah soal bagaimana anggota atau massa yang diorganisasikannya sejahtera, sedangkan soal politik itu urusan gerakan mahasiswa atau partai politik. Suatu pernyataan yang benar secara prinsip namun salah dalam pemahaman. Adalah benar bahwa tugas organisasi adalah membuat anggota atau kelas yang diorganisasikannya mencapai kesejahteraan, tetapi salah apabila kemu-

dian melupakan bahwa kesejahteraan hanya dapat diperoleh apabila kekuasaan politik telah direbut oleh kelas yang akan menghapuskan penindasan.

Pengorganisasian adalah bekerja bersamanya sekelompok orang untuk membuat sesuatu yang tak berjalan dan mengalami kemacetan dapat berjalan sebagaimana semestinya. Intinya adalah terjadinya perubahan ke arah kemajuan dan lebih baik. Untuk kasus Indonesia, ada beberapa kondisi yang menyebabkan pengorganisasian rakyat pekerja menjadi tak jelas orientasinya, terutama gerakan sosial. Diantaranya adalah:

a. Tidak memiliki 'orientasi politik' yang tegas

Masyarakat sipil didefinisikan sebagai "masyarakat yang sadar politik tapi tidak berambisi untuk merebut kekuasaan politik" (Coen Husein Pontoh, 2000). Setidaknya ada dua gerbong demokrasi yang memiliki kesamaan dengan cara pandang anti politik. Pertama, sebagian besar aktivis LSM Indonesia fasih politik dan menjadi fasilitator *civic education* yang meng-giring kesadaran massa untuk anti partai politik dan negara, namun tidak melahirkan ruang politik yang signifikan di tingkat lokal. Kedua,

student movement sisa-sisa Mei '98, dengan alasan tidak mau mengulangi kesalahan Angkatan '66, diam-diam membelot menjadi kaki tangan kekuasaan korup.⁵ Ada sebuah gerbong lagi yang perlu ditambahkan yaitu organisasi-organisasi rakyat pekerja seperti serikat buruh, serikat tani, dan kaum miskin kota yang gatal untuk berpolitik namun riuh untuk terjun langsung. Sikap dan tindakan organisasi rakyat pekerja ini lahir dari ketidak beranian untuk meninggalkan induk semangnya, para LSM yang berkontribusi terhadap jalannya program organisasi. Sikap bimbang organisasi rakyat pekerja inilah yang mewarnai tingginya angka GOLPUT⁶ pada PEMILU 2005. Banyak organisasi rakyat pekerja bekerja sama pada program seperti anti militerisme pada PEMILU 2005 tapi tidak mau eksplisit dalam posisi pemenang langsung satu calon. Guillermo O'Donnell menegaskan kenapa pilihan berpolitik adalah

dengan mendeklarasikan partai sendiri atau masuk parpol yang segaris menjadi kunci bagi orientasi organisasi rakyat pekerja. Parpol adalah kendaraan terbaik untuk terlibat dalam pengelolaan kekuasaan secara aktual dan efektif, parpol tidak hanya bersikap mengawasi pemerintahan yang busuk tetapi juga menggantikan pemerintahan tersebut. Parpol memiliki isu yang paling menyeluruh dan karena itu menjangkau kelas masyarakat yang paling luas. Parpol tidak bekerja berdasarkan isu tapi bekerja atas dasar kepentingan paling mendasar dari kelas pekerja.

b. Pengorganisasian kasus

Tersandung pada ketidakjelasan orientasi politik berimbas pada metode dan praktik pengorganisasian rakyat pekerja di Indonesia. Tidak tuntas pada level pembacaan ekonomi-politik dan geopolitik membuat gerakan rakyat pekerja acak dalam peng-

⁵ Beberapa kaum muda malah menjadi *darah segar* bagi alat politik Orde Baru seperti GOLKAR dan tak jarang pula yang menjadi *think tank*-nya militer seperti Susilo Bambang Yudhono. Istilah *darah segar* merujuk pada korespondensi Budiman Sudjatmiko ketika masih kuliah di Inggris dengan Agus Subhan yang menegaskan bahwa kaum muda kehilangan moralitas perjuangannya.

⁶ GOLPUT di era demokrasi liberal berbeda dengan tindakan yang dilakukan Arief Budiman di zaman Otoritarian yang merupakan *power blocking* yang efektif terhadap rezim. GOLPUT di era demokrasi liberal adalah tindakan paradigmatik kelas kapitalis untuk mengeliminasi rakyat dari partisipasi politik secara aktif yang tetap memelihara depolitisasi melalui *floating mass*.

organisasiannya. Pendekatan asal ada kasus untuk diorganisasikan adalah fenomena yang lazim ditemukan dalam keseharian gerakan rakyat pekerja. Pendekatan ini berimplikasi pada sulitnya mencari benang merah satu kasus dengan kasus lain karena mengalami spesifikasi dan cenderung parsial.

Pengorganisasian kasus bukanlah barang haram dalam meluaskan agitasi propaganda, namun harus dipahami sebagai faktor penunjang dari target sesungguhnya. Pengorganisasian kasus sering bertendensi ekonomisme dengan pola advokasi. Pola advokasi menciptakan jarak organisasi rakyat pekerja dengan korban.

Dari awal 2003-2005 terjadi PHK massal hampir di semua jenis industri, BUMN, manufaktur, dan lainnya. PHK massal ini telah mendorong inisiatif serikat-serikat buruh dalam beragam warna politik dan pendamping untuk menggalang Aliansi Tolak PHK (ATP) di berbagai kota di Indonesia. ATP mengorganisasikan pemogokan massal di berbagai pabrik serta menduduki kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hampir satu bulan, serta berulang kali dalam waktu terpisah. Beberapa tuntutan ATP adalah: subsidi

langsung, akses seluruh proses produksi termasuk rahasia perusahaan dengan menghasilkan UU-nya, kontrol melalui dewan buruh, dan pengambilalihan perusahaan bangkrut oleh negara.

Kekuatan korban PHK yang terorganisasi dalam ATP ternyata belum mampu menjadi persatuan di kalangan kaum buruh untuk meningkatkan program dan kesolidan. ATP oleh beberapa serikat buruh lebih dipandang sebagai penyelesaian kasus dan masih dalam kerangka taktis.

Pandangan PHK sebagai suatu kasus adalah pandangan yang sangat keliru karena PHK adalah implikasi neoliberalisme secara konkret melaku program deindustrialisasi, *Labour Market Flexibility*, dan Relokasi Industri. Pada garis strategis itulah serikat-serikat buruh memandang persoalannya bukanlah semata-mata PHK yang kasuistis melainkan cengkeraman neoliberalisme yang mestinya direspons dengan program bersama yang sistematis.

Sejarah terulang lagi dalam aliansi rakyat untuk merespons Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Respons yang mencuat di media dan di lapangan terfokus pada penolakan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 itu namun tidak melihat secara

objektif *basic issue* dan taktik perjuangan massa. Aliansi Tolak Perpres mampu menggalang semua sektor rakyat pekerja dalam aksi bersama. Namun demikian, meski ada perspektif reforma agraria dari serikat petani, tetap kalah bersaing dengan konsentrasi penolakan Perpres Nomor 36.

"Target konsolidasi gerakan dalam momentum penolakan Perpres 36 tidak boleh terpelintir dengan ilusi bahwa tujuan akhirnya adalah mencabut Perpres saja. Ada atau tidak ada Perpres, pengusuran paksa terbukti berjumlah sangat besar beberapa tahun terakhir. Adanya Perpres justru menandai suatu pernyataan politik ke dalam di antara elite-elite politik yang menguasai dan terkait dengan negara bahwa mereka harus solid dalam suatu proyek bersama yang membutuhkan koordinasi untuk menggusur rakyat. Beberapa tahun ini, tidak ada konsolidasi secara optimal, sehingga terjadi ulur-mengulur yang memakan waktu. Pengusuran ini tidak akan berhenti dengan atau tanpa Perpres 36. Bila sepakat dengan itu, agenda strategisnya adalah

bagaimana menempatkan perjuangan rakyat pekerja dalam kondisi seperti itu. Rakyat akan berhadap-hadapan dengan aparat negara dalam berbagai kasus, akankah kita siap atau tidak siap dengan langkah yang strategis, reaksioner, atau kasuistik?⁷"

c. Kehancuran kolektivitas dan solidaritas

Rasa senasib dan sepenenderitaan merupakan materi dasar untuk pembangunan organisasi di kalangan rakyat pekerja: terhisap oleh sistem produksi, terdiskriminasi oleh negara, dan teralienasi dari budaya dan agama sehingga memicu rasa kolektivitas dalam relasi sosialnya. Kolektivitas pulalah yang menjadi hantu atau momok bagi kekuasaan yang korup. Sementara itu solidaritas hadir sebagai bangunan tak terpisahkan dalam kolektivitas; solidaritas hadir sebagai wajah asli dari jalinan kolektif tersebut.

Celaka sungguh celaka ketika fondasi dan harta pusaka rakyat pekerja tersebut digerogeti oleh gurita dan ternyata lembaga yang ingin memberdayakan mereka justru melahirkan masalah baru

⁷ Dalam korespondensi dengan Irwansyah dalam hubungan dengan rencana tesis tentang "Gerakan Korban Pengusuran" di Institute of Social Studies (ISS) Belanda

yang jauh dari tradisi rakyat pekerja dalam memecahkan persoalannya.

Merujuk cara pengorganisasian yang dikatakan wahid dan menjadi momok pemerintahan di Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di satu sisi telah mengikis kolektivitas dan solidaritas di tengah massa rakyat. Praktik beberapa tahun terakhir dengan memberikan imbalan *per diem* atau uang bulanan pada simpul-simpul massa di kampung telah menjadi kecemburuan sosial di kalangan rakyat miskin kota.⁸ Sebagian mereka yang menjadi simpul massa justru memilih meninggalkan pekerjaan sebagai tukang bakso, pedagang kaki lima, atau tukang becak, dan mengalami mobilitas vertikal secara *personal* dengan *new life style* mendokumen rapat dan aksi besar-besaran.

Kehancuran kolektivitas dan solidaritas juga terjadi di beberapa serikat buruh dan tani yang memiliki *bapak pendamping*. Serikat-serikat rakyat pekerja ini kehilangan kemandiariannya dalam menjalankan program organisasi, seperti ke-

kuatan dana organisasi dari iuran anggota sudah digantikan oleh proposal donor. Pola *netek* donor ini menyebabkan hancurnya daya tahan organisasi dalam menghadapi masalah. Di kalangan buruh, pemogokan tidak lagi menjadi senjata pamungkas karena serikat tidak memiliki iuran untuk dana kompensasi. Sementara itu merujuk pada stempel negara (kekuasaan), serikat-serikat yang dikategorikan INDEPENDEN ini dalam kenyataannya adalah jauh panggang dari api!

Secara faktual hal ini tidak hanya dialami oleh satu lembaga saja. Langgam pengorganisasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia pada umumnya telah mendistorsi orisinalitas rakyat pekerja. Tak dapat disangkal pemanglum terjadi hampir di semua tataran dengan argumentasi klasik atau retorik.

d. Sektarianisme

Alangkah celaka nasib rakyat pekerja Indonesia, sudah terhisap dan tersingkirkan, program-programnya pun diharamkan karena mengidap penyakit sektarianisme dan subjektivisme

⁸ Data dari wawancara langsung dengan pengurus LSM yang menangani kasus-kasus penggusuran di Jakarta.

di kalangan sesama. Sekte-
rianisme ini merupakan penyakit
warisan dari pemahaman lapak-
lapakan aristokrat/elite pengambil
kebijakan di tataran organisasi
rakyat pekerja. Lebih mengutama
isu sektoral dan tidak mau terlibat
dalam aliansi luas di bawah
kepentingan politik kelas. Praktik
aksi masih sering menonjolkan
simbol-simbol organisasi dan tidak
mematuhi kepemimpinan la-
pangan adalah protret nyata dari
praktik sektarianisme. Keculasan
ini tak hanya berhenti pada praktik
colong-menyolong di lapangan
aksi, tetapi kenyataannya cukup
parah, yakni tidak mau bergabung
dalam aliansi untuk merespons isu
bersama karena adanya kelompok
P, R, atau S. Inilah penyakit kronis
yang harusnya menjadi koreksi
bila kekuatan rakyat pekerja
Indonesia akan mengikuti jejak
langkah gerakan rakyat pekerja
Amerika Latin.

e. Persatuan kelas tertindas

Kemiskinan dan keterasingan
tidak hanya menimpa segolongan
buruh-tani saja, tetapi melanda
semua lapisan rakyat pekerja,
tidak memandang apakah ketua
serikat buruh, sarjana, tukang
becak, pedagang kaki lima, laki-
laki, atau perempuan. Politik

identitas atas kesamaan nasib-lah
yang bisa menjadi perekat bagi
persatuan kelas.

Persatuan Rakyat Pekerja adalah
syarat mutlak untuk mencapai
kekuasaan. Persatuan untuk mele-
paskan diri dari imperialisme
Amerika tidak bisa dipisahkan
dengan perjuangan melawan
reaksi, perjuangan untuk perda-
maian, untuk demokrasi, dan
untuk sepiring nasi. Jelaslah
bahwa hak dan kebebasan bagi
rakyat pekerja adalah: hak
mendapat pekerjaan, bebas dari
ancaman pengangguran, hak
mendapat upah penuh, dan bebas
dari perbedaan ras dan gender.
Rakyat pekerja tidak mungkin
mendapat semua hak-haknya jika
tidak ada persatuan kelas
tertindas. Persatuan itu harus
dilakukan mulai tingkatan nasional
hingga sektoral seperti buruh,
petani, dan kaum miskin kota.
Diperlukan pula etos dalam
perluasan organisasi rakyat
pekerja secara bersama untuk
melaksanakan suatu unifikasi.

James Petras memberikan gam-
baran tentang kaum tani di Ame-
rika Latin, yaitu bahwa setelah
lebih dari 20 tahun mereka kem-
bali bangkit sebagai aktor sejarah
untuk memainkan peran sentral
dalam perubahan rezim,

dan memimpin perjuangan menentang perjanjian perdagangan internasional (ALCA atau wilayah perdagangan bebas Amerika/*Free Trade Area of the Americas*), dengan mendirikan kekuasaan yang berbasis lokal dan regional. Di banyak negara, koalisi buruh tani tak bertanah (*coalitions of landless farm workers*), keluarga petani kecil (*small family farmers*), dan kaum tani (*peasants*), mengambil peran sentral dalam perjuangan nasional menentang neoliberalisme dan kebijakan perdagangan bebas.

Penutup

Wajah bopeng pengorganisasian rakyat pekerja di atas mungkin membuat malu *mbah-mbah* yang pernah membangun partai rakyat pekerja pertama di Asia dan negara kolonial pada tahun 1920-an. Namun, pertanggungjawaban sejarah bukan pada masa lampau melainkan pada pertarungan hari ini dan esok. Di tengah gerakan-gerakan, rakyat pekerja belum kunjung memperoleh peran yang signifikan karena posisi politik mereka yang masih berada di pinggiran: masih berperan sebagai tukang demo, tukang bikin proposal,

dan pengawal nilai-nilai luhur kemanusiaan. Persoalan pokoknya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai luhur yang diyakini itu dalam kehidupan politik praktis dan realisasi kekuasaan rakyat pekerja.

Tindakan kekiri-kirian, langsung atau pun tidak, masih bersemayam dalam gerakan rakyat pekerja hari ini. Vulgarnya propaganda sosialisme, revolusi agraria, serta program-program maksimum lainnya adalah tindakan prematur. Penulis tidak bertendensi paranoid terhadap hegemoni rezim atau bahkan menyangsikan kebenaran wacana di atas secara prinsipil. Masalahnya adalah tidak tersedianya rantai material yang cukup kuat untuk menyangga wacana dan program-program maju di atas. Tak ubahnya onani atau aborsi di kalangan sendiri!

Kesadaran massa selama 30 tahun terkonstruksi telah mengharamkan 'sosialisme,' 'kiri', bahkan 'politik praktis.' Kesadaran massa membangun didikan Orde Baru tidak hanya di tataran politik tetapi sudah masuk pada konstruksi sosial yang membangun memori kolektif. Produk sosial Orde Baru telah melekat hingga alam bawah sadar masyarakat Indonesia seperti pengasosiasian maling ayam,

pemerksa, dan tindakan kriminal lainnya dengan stempel 'komunis'.

Selayaknya ideolog dan penyusun strategi gerakan rakyat pekerja mampu menilik konstruksi kesadaran massa di atas secara kritis. Memang benar pengalaman gerakan reformasi 1998 telah memberikan pelajaran tentang aksi massa sebagai senjata penting perjuangan. Setelah itu, banyak aksi kaum tani yang mengklaim kembali tanahnya, gerakan melawan penggusuran, dan penolakan PHK.

Dapat disimpulkan bahwa, pertama, sejak zaman dahulu di Nusantara sudah dikenal istilah amuk massa secara spontan untuk melawan penindasan; kedua, materialisme historis menegaskan bahwa tingkat kesadaran massa paling dini adalah impresi. Lalu seberapa lama impresi aksi massa 1998 mampu diinternalisasikan oleh masyarakat yang

masih lekat di pikiran mereka tentang semua stempel Orde Baru. Tak pelak banyak kalangan pragmatis mengatakan situasi tersebut sebagai amnesia kolektif dari masyarakat Indonesia.

Tanpa bermaksud menghakimi diri sendiri atau memberikan resep mujarab, perjuangan rakyat pekerja saat ini mulai menunjukkan adanya berbagai kreativitas dalam hal strategi dan taktik untuk menerjemahkan politik kelas dalam berbagai kondisi obyektif yang sesuai dengan masyarakatnya. Banyak praktik yang bisa dirujuk seperti tawaran unifikasi kiri-tengah, eksodus ke partai-partai yang platform-nya agak sama, atau pilihan kalangan LSM yang terinspirasi kemenangan Muspani dalam DPD bahwa untuk berkuasa harus bikin partai. Apa pun pilihan dan taktiknya, semua layak dicoba dalam koridor eksperimentasi politik kelas di Indonesia hari ini.

Daftar Rujukan

- Cohen, Robert dan Peter C. W. Gutkind. 1979. *Peasants and Proletarians: The Struggles of Third World Workers*
- Kleden, Ignas. 2003. 'Upper Class Luxury Destroying Civil Society'. *The Jakarta Post* March 13.
- Machel, Samora. 1999. *Pemimpin Visioner*. Sahe Institut.

Mao Tse Tung. 1969. Mengubah Pelajaran Kita. Peking: Pustaka Bahasa Asing.

Petras, James. 2005. Strategi-strategi Perjuangan: Sentralisasi Gerakan Tani di Amerika Latin.

Pontoh, Coen Husein. 2004. Masyarakat Sipil sebagai agen Globalisasi. Jakarta: INSIST.

Sandbrook, Richard. 1975. Proletarians and African Capitalism: The Kenyan Case, 1960-1972. London: Cambridge University Press.

Wilson. 2003. Masyarakat dan Kelas Sosial di Indonesia. Jakarta.

Yayasan "Pembaruan" Jakarta. 1952. Kewajiban Front Persatuan Buruh.

